



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai pemberitaan yang muncul di media massa pernah dilakukan sebelumnya. Seperti misalnya penelitian yang dilakukan dalam skripsi yang ditulis oleh Risang Permadi, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam judul *Pemberitaan Dugaan Rekayasa Kriminalisasi KPK Pasca Mahkamah Konstitusi Memperdengarkan Rekaman Penyadapan Telepon Oleh KPK* dan oleh Parulian Sitompul, peneliti pada BPPKI Bandung Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo RI, dalam judul *Konstruksi Realitas Peran KPK Dalam Pemberitaan Online Terkat Kasus Korupsi*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Risang Permadi dalam judul *Pemberitaan Dugaan Rekayasa Kriminalisasi KPK Pasca Mahkamah Konstitusi Memperdengarkan Rekaman Penyadapan Telepon Oleh KPK* membahas mengenai pemberitaan terkait dugaan kriminalisasi KPK setelah rekaman penyadapan telepon oleh KPK diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui keberpihakan *Kompas* dalam pemberitaan dugaan rekayasa kriminalisasi KPK pasca pemutaran rekaman penyadapan telepon dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif.

Berbeda dengan skripsi Risang Permadi, jurnal yang ditulis oleh Parulian Sitompul dalam judul *Konstruksi Realitas Peran KPK Dalam Pemberitaan Online*

*Terkat Kasus Korupsi* menggunakan metode analisis framing. Dalam jurnal ini, dibahas tentang konstruksi realitas peran KPK dalam pemberitaan *online* terkait kasus korupsi. Model analisis framing yang digunakan adalah model analisis framing Robert Entman. Kedua penelitian ini merupakan salah dua dari penelitian yang pernah ada terkait KPK.

Dalam penelitian kali ini, penulis membahas mengenai kriminalisasi KPK terkait kasus pemalsuan dokumen yang menjadikan Abraham Samad sebagai tersangka. Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut tabel perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Isi Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
Risang Permadi	<i>Pemberitaan Dugaan Rekayasa Kriminalisasi KPK Pasca Mahkamah Konstitusi Memperdengarkan Rekaman Penyadapan Telepon Oleh KPK</i>	Analisis Isi Kuantitatif	Membahas mengenai pemberitaan dugaan kriminalisasi KPK setelah rekaman penyadapan telepon oleh KPK diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi	Penulis membahas mengenai kriminalisasi KPK terkait kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad di Harian <i>Kompas</i> . Metode yang digunakan adalah analisis framing Robert Entman
Parulian Sitompul	<i>Konstruksi Realitas Peran KPK Dalam Pemberitaan Online Terkat Kasus Korupsi</i>	Analisis Framing Robert Entman	Membahas mengenai konstruksi realitas peran KPK dalam pemberitaan <i>online</i> terkait kasus korupsi	Penulis membahas mengenai kriminalisasi KPK terkait kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad di Harian <i>Kompas</i> .

## 2.2. KONSTRUKSI SOSIAL ATAS REALITAS

Istilah konstruksi sosial atau realitas pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Berger dan Luckmann menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi yang menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif, terus menerus (Tamburaka, 2013, h. 75).

Berger dan Luckmann menyatakan bahwa realitas kehidupan sehari-hari kita bagi dengan orang lain. Melalui situasi tatap muka, setiap orang mengalami pengalaman-pengalaman yang penting. Masyarakat dapat merasakan tanda-tanda yang dapat dimaknai oleh setiap individu berdasarkan kesubjektifannya (Berger dan Luckmann, 1991, h. 43). Dari interaksi tersebut, diperoleh hasil penemuan yang membentuk pengetahuan setiap individu dan proses tersebut disebut sebagai konstruksi sosial.

Menurut Berger, realitas dibentuk dan dikonstruksi dan setiap individu memiliki konstruksinya masing-masing atas suatu realitas. Pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan yang dimiliki membantu setiap individu dalam menafsirkan suatu realitas dengan konstruksinya masing-masing. Hal ini dikarenakan, setiap individu memiliki pengalaman, latar belakang, dan lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penafsiran dari setiap individu pun akan berbeda pula (Eriyanto, 2012, h. 18).

Berger menyatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural. Dalam proses dialektis, terdapat tiga tahapan yang disebut sebagai momen, antara lain, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pertama, eksternalisasi adalah penyesuaian diri manusia dengan lingkungannya. Melalui penyesuaian diri, manusia mampu menemukan dirinya dalam suatu dunia. Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang dicapai dari kegiatan eksternalisasi tersebut. Hasil dapat berupa alat atau bahasa yang digunakan dalam melakukan kegiatan eksternalisasi ketika berhadapan dengan dunia. Ketiga, internalisasi adalah proses penafsiran suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari proses subjektif orang lain yang kemudian menjadi bermakna subjektif bagi individu itu sendiri. Dalam hal ini, media massa dapat membentuk sebuah pengertian bersama atau opini publik yang sama (Eriyanto, 2012, h. 16).

Gambar 2.1 Proses Dialektis



Sumber: Pribadi, 2015

## 2.2.1 KONSTRUKSI SOSIAL DI MEDIA MASSA

Proses konstruksi realitas pada prinsipnya merupakan upaya menceritakan atau konseptualisasi sebuah peristiwa dan keadaan. Pekerjaan media adalah menceritakan rangkaian peristiwa. Oleh karena itu, seluruh isi media merupakan realitas yang telah melewati tahap konstruksi kembali. Pembuatan berita media massa pada dasarnya adalah proses konstruksi realitas-realitas yang menghasilkan wacana yang bermakna (Syahputra, 2006, h.33).

Denis McQuil (dikutip dalam Syahputra, 2006, h. 33) menunjukkan enam kemungkinan yang dapat dilakukan oleh media dalam mengajukan realitas:

1. Sebagai jendela (*a window*). Media membuka cakrawala dan menyajikan realitas dalam berita yang apa adanya
2. Sebagai cermin (*a mirror*). Media merupakan pantulan dari berbagai peristiwa (realitas)
3. Sebagai filter atau penjaga gawang (*a filter or gate-keeper*). Media menyeleksi realitas sebelum disajikan pada khalayak. Realitas disajikan tidak utuh lagi.
4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penerjemah (*a signpost, guide or interpreter*). Media mengkonstruksi realitas sesuai dengan kebutuhan khalayak.

5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (*a forum or platform*). Media menjadikan realitas sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat realitas intersubyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan.

6. Sebagai tabir atau penghalang (*a screen or barrier*).

Media memisahkan khalayak dari realitas sebenarnya.

Gaye Tuchman (dikutip dalam Siebert dan Baumann, 1990, h. 42) juga menyatakan bahwa berita adalah jendela dunia . Melalui berita yang disajikan, masyarakat dapat melihat, mengetahui, dan merasakan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Cara melihatnya pun tergantung dari berita yang disajikan. Jendela apa yang digunakan dalam berita tersebut dan sebesar apa jendela dalam berita tersebut.

Besar atau kecilnya jendela dalam berita tersebut mempengaruhi pandangan khalayak dalam melihat suatu peristiwa. Semakin besar jendela yang disajikan media dalam sebuah berita akan memberikan pengaruh dalam pandangan khalayak secara luas. Sedangkan, semakin kecil jendela yang disajikan media dalam sebuah berita akan memberikan pengaruh dalam pandangan khalayak secara sempit. Oleh karena itu, media memiliki pengaruh dalam menentukan pandangan yang akan dimiliki oleh khalayak.

Pada dasarnya, media merupakan agen konstruksi pesan. Berita yang terdapat pada media adalah hasil konstruksi sosial yang selalu melihatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan dan media tersebut.

Dalam hal ini, wartawan bukan pelapor, melainkan agen konstruksi pesan. Bagaimana realitas tersebut dijadikan berita, tergantung pada fakta itu dipahami dan dimaknai oleh wartawan. Dengan kata lain, fakta atau peristiwa yang disajikan dalam sebuah berita merupakan hasil konstruksi dari wartawan atau media itu sendiri. Realitas yang sama pun akan menjadi berbeda apabila dilihat dengan cara yang berbeda pula (Eriyanto, 2012, h. 25).

Tidak hanya itu, konstruksi realitas yang terbentuk dalam sebuah berita seringkali dipengaruhi baik banyak ataupun sedikit oleh kebijakan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan atau eksekutif media massa itu sendiri. Dalam hal ini, berita bersifat subjektif karena dalam proses peliputan, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif yang membuat opini tidak dapat dihilangkan dalam proses pembentukan berita.

Produksi konstruksi realitas yang dilakukan media massa secara terus menerus menggantikan pengetahuan yang telah ditanamkan melalui kegiatan interaksi dengan orang lain dan didapat dari orang-orang yang memiliki posisi tinggi, seperti orang bijak, pendeta, kaum bangsawan, agama, dan lainnya. Konstruksi yang dibentuk dalam berita tersebut membawa pemahaman baru bagi khalayaknya, sehingga membuat pemahaman yang khalayak miliki dipengaruhi oleh pemahaman yang dibentuk media tersebut (Luhmann, 2000, h. 86).



## 2.3. FRAMING

Berbeda dengan konstruksi sosial, framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Pada proses framing, terdapat isu-isu yang ditonjolkan dan dihilangkan. Hal ini guna menarik perhatian khalayak dan memudahkan khalayak dalam mengingat aspek-aspek tertentu. Frank D. Durham mengatakan bahwa framing membuat dunia lebih dikenal dan lebih dimengerti. Oleh karena itu, media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa agar lebih mudah diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2012, h. 76).

Framing telah didefinisikan oleh beberapa orang, seperti Robert M. Entman, William A Gamson, Todd Gitling, David E. Snow dan Robert Sanford, Amy Binder, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sebagai berikut

Tabel 2.2 Definisi Framing

Nama	Definisi
Robert M. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas dengan menonjolkan aspek tertentu dan menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide yang terorganisir dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana terbentuk dalam sebuah kemasan ( <i>package</i> ). Kemasan yang disebutkan merupakan skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan yang disampaikan dan untuk menafsirkan makna pesan yang diterima.
Todd Gitlin	Sebuah strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan pada pemberitaan agar tampak menonjol dan

	menarik perhatian khalayak pembaca. Hal itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow dan Ribert Sanford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu menjadi kata kunci yang diwujudkan oleh <i>frame</i> , selain itu <i>frame</i> juga mengorganisasikan sistem kepercayaan.
Amy Binder	Skema interpretasi untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita dengan menggunakan perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber: Eriyanto, 2012

Dapat disimpulkan bahwa framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Melalui perspektif yang ada, akan ditentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan dan dihilangkan, dan ke arah mana berita tersebut akan dibawa. Seperti yang dikatakan oleh Todd Gitlin di atas, framing adalah strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak.

Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses framing, yaitu memilih dan menonjolkan. Dalam tulisannya, wartawan memilih terlebih dahulu realitas mana yang akan ditampilkan dalam tulisannya. Setelah memilih realitas yang akan ditulis, wartawan akan memilih informasi-informasi yang mampu mendukung realitas tersebut sehingga khalayak dapat mengerti langsung mengenai realitas

apa yang sedang dikonstruksi oleh wartawan dan informasi tersebut membantu wartawan untuk menonjolkan realitas yang telah dipilih oleh wartawan. Melalui proses tersebut, wartawan dapat menonjolkan hal-hal mengenai masalah yang sedang dibahas, penyebab masalah, pesan moral dari tulisan tersebut, dan solusinya (Entman, 1993, h. 52).

Pada studi media, konsep framing mendapat pengaruh dari lingkungan psikologi dan sosiologi. Dalam dimensi psikologi, framing merupakan upaya yang dilakukan wartawan untuk menekankan dan membuat pesan menjadi bermakna, lebih mencolok, dan diperhatikan khalayak. Upaya ini tidak lepas dari aspek psikologi. Orang cenderung menyederhanakan realitas agar mempunyai perspektif tertentu, Orang juga melihat dunia ini dalam perspektif tertentu. Realitas juga dilihat dalam kerangka berpikir tertentu. Oleh karena itu, realitas yang sama dapat digambarkan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Sedangkan, dalam dimensi sosiologi, frame dilihat untuk menjelaskan bagaimana organisasi dari ruang berita dan pembuat berita membentuk secara bersama-sama. Pada dimensi ini, media ditempatkan sebagai organisasi yang kompleks. Hal ini membuat berita dilihat sebagai institusi sosial yang mampu memberikan informasi kepada khalayak melalui organisasinya, yaitu media (Eriyanto, 2012, h. 82-83).

Dalam analisis framing terdapat empat model besar yang sering digunakan dalam penelitian, antara lain model Robert M. Entman, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, Gamson dan Modigliani, dan Murray Edelman. Menurut Edelman, realitas yang diketahui tergantung pada bagaimana realitas tersebut

dibingkai dan dikonstruksi. Realitas yang sama bisa menghasilkan realitas yang berbeda ketika dibingkai dan dikonstruksi dengan cara yang berbeda (Eriyanto, 2012, h 221). Menurut Entman, konsep framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media (Entman, 1993, h. 52). Sedangkan, Pan dan Kosicki berasumsi bahwa setiap berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Ide tersebut dihubungkan dengan elemen-elemen lain, seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Model Gamson dan Modigliani didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media yang terdiri atas *package interpretative* yang mengandung konstruksi makna tertentu (Sobur, 2009, h. 175).

Tabel 2.3 Model Analisis Framing

No	Scholars	Framing Devices
1	Robert Entman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Problem Identification: peristiwa dilihat sebagai apa</li> <li>- Causal Interpretation: siapa penyebab masalah</li> <li>- Moral Evaluation: penilaian atas penyebab masalah</li> <li>- Treatment Recommendation: saran penanggulangan masalah</li> </ul>
2	Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sintaksis: cara wartawan menyusun fakta (<i>headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup</i>)</li> <li>- Skrip: cara wartawan mengisahkan fakta (<i>who, what, when, where, why, how</i>)</li> <li>- Tematik: cara wartawan menulis fakta (<i>paragraph, proposisi</i>)</li> <li>- Retoris: cara wartawan menekankan fakta (<i>kata, idiom, gambar/foto,</i></li> </ul>

		grafik)
3	Gamson dan Modigliani	Framing Devices: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metaphors</li> <li>- Exemplars</li> <li>- Catchphrases</li> <li>- Depictions</li> <li>- Visual Images</li> </ul> Reasoning Devices: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roots</li> <li>- Appeal to Principle</li> </ul>
4	Murray Edelman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kategorisasi</li> <li>- Kesalahan Kategorisasi</li> <li>- Rubrikasi</li> </ul>

Pada akhirnya, framing menentukan bagaimana realitas tersebut hadir di hadapan pembaca. Melalui framing, sebuah berita yang sama dapat menghasilkan berita yang berbeda sesuai dengan frame yang dimiliki oleh wartawan itu sendiri. Dengan analisis framing, pembaca dapat mengetahui bagaimana realitas peristiwa yang sama dikemas secara berbeda oleh wartawan (Eriyanto, 2012, h. 97). Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan model analisis framing Robert M. Entman.

## 2.4. KRIMINALISASI

Pada tulisan Louise Johnson (2014, h. 121) yang berjudul *Media, Politics, and Criminalisation: An Increasingly Problematic Relationship* disebutkan bahwa kriminalisasi merupakan bentuk tanggapan politik terhadap kekhawatiran publik yang dipromosikan oleh media. Namun, pada dasarnya, politisi memiliki agenda politiknya masing-masing yang digunakan untuk menanggapi kekhawatiran publik yang digambarkan oleh media melalui kriminalisasi.

Dalam hal ini, Ashworth (dikutip dalam Johnson, 2014, h. 121) telah menyatakan bahwa terciptanya tindak pidana baru sering dianggap sebagai respon politik langsung yang memuaskan kekhawatiran masyarakat tentang bentuk perilaku yang telah dipublikasikan oleh media. Tekanan pada politisi untuk terlihat sedang melakukan sesuatu yang besar dan menanggapi respon seperti konsultasi dan mengawasi penelitian dapat mengundang kritik terkait kebingungan dan penundaan.

Dari pernyataan di atas terdapat dua isu penting yang dibahas oleh Ashworth. Pertama, Ashworth menunjukkan kriminalisasi adalah hasil dari reaksi politisi terhadap persepsi khalayak yang telah dibentuk oleh media. Dampak media ini perlu diteliti terlebih dahulu, terutama mengenai potensi lain yang dapat ditimbulkan oleh kriminalisasi. Hal ini akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut akurat dalam menyatakan kriminalisasi 'sering' merupakan hasil penggambaran kejahatan yang dilakukan media.

Isu kedua yang diangkat oleh Ashworth adalah proses penundaan. Untuk menganalisis kebenaran pernyataan ini, pemeriksaan undang-undang bergegas dan berkepanjangan harus dilakukan secara individual. Johnson (2014, h. 122) pun berpendapat bahwa media memiliki dampak yang pasti dalam kriminalisasi. Namun, tidak dapat dilupakan bahwa masih ada agenda politik yang akan ikut mempengaruhi kriminalisasi. Masyarakat pun dapat ikut terlibat dalam proses politik kriminalisasi melalui pertimbangannya terkait tanggapan yang diberikan oleh politisi.

## 2.4.1 MEDIA DAN KRIMINALISASI

Siahaan (2015, h. 135) mengungkapkan bahwa tindakan kriminalisasi dalam mengungkap kasus korupsi adalah tindakan yang mencari-cari kesalahan seseorang atas perbuatan korupsi. Johnson (2014, h. 122) pun berpendapat bahwa media memiliki peran dalam kriminalisasi berita. Media membentuk kriminalisasi dengan menyembunyikan frekuensi jumlah kejahatan yang dibuat dan menyimpulkan secara langsung tindak pidana yang terjadi ke dalam bentuk berita.

Tujuan utama dari setiap media adalah menarik penonton. Hal ini dilakukan dengan menyajikan cerita-cerita yang menarik ke dalam sebuah berita. Cerita mengenai kejahatan merupakan salah satu contohnya. Bukan hal yang asing bagi media untuk memberitakan kejahatan, seperti kriminalisasi. Dalam hal ini, Ashworth (dikutip dalam Johnson, 2013, h. 122) berpendapat bahwa media memiliki efek yang signifikan pada kriminalisasi.

Pemberitaan yang dilakukan media mengenai pidana tidak hanya menarik perhatian penonton, tetapi juga membentuk opini publik dan kebijakan yang akan berdampak pada politik. Namun, pada dasarnya, media merupakan lembaga sosial yang terikat di bawah naungan pemilik modal atau pengusaha yang memiliki kepentingan dan kepribadian tersendiri. Menurut Arifin (dikutip dalam Tamburaka, 2013, h. 96), hal ini disebut sebagai politik redaksi. Arifin pun menjelaskan bahwa apabila politikus ingin memanfaatkan media massa sebagai media politik, maka

politikus perlu memahami politik redaksi dan agenda yang dimiliki oleh masing-masing media. Pada dasarnya, bukan politikus yang mengontrol dan mengendalikan media, melainkan media massa yang mengontrol dan mengendalikan kegiatan politik para politikus (Arifin, 2010, h. 130).

Johnson (2014, h. 123) juga berpendapat bahwa efek yang media berikan kepada politikus bukan hanya menyadarkan politikus atas suatu masalah atau peristiwa yang terjadi. Namun, politikus diberi kesempatan untuk ikut terjun dalam permasalahan yang diberitakan oleh media, sehingga politikus dapat memilah hal mana yang dapat menjadi sebuah keuntungan bagi politikus itu sendiri.

Pada dasarnya, media merupakan pemeran utama dalam membentuk kriminalisasi. Media melakukan manipulasi mengenai frekuensi munculnya tindak pidana yang hendak dikriminalisasi. Tidak dijelaskan oleh media seberapa sering kejahatan terjadi, sehingga media dapat melebih-lebihkan jumlah angka kejahatan yang ada dalam berita yang disajikan dan menyampaikan kepada khalayak sebagai sebuah kriminalisasi (Johnson, 2014, h. 122). Hall, dkk. (1978, h. 31) dalam bukunya yang berjudul *Policing The Crisis* menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilaporkan kepada pihak media tidak semuanya dilaporkan secara jelas. Sebagian di antaranya juga tidak memiliki nilai *news-worthy*. Oleh sebab itu, media menyimpulkan sendiri suatu realitas yang ada berdasarkan pemaknaan dari pengetahuan yang dimiliki oleh wartawan atau media itu sendiri.



Media pun mempengaruhi bagaimana Undang-Undang terbentuk atau disahkan melalui pemberitaanya. Dalam hal ini media, memberikan informasi kepada khalayak yang akan berdampak pada perbuatan yang menghasilkan sebuah keputusan (Johnson, 2014, h. 122).

Dalam membentuk kriminalisasi, perlu ada faktor lain yang dapat mempengaruhi jenis perilaku yang dikriminalisasi. Ashworth (dikutip dalam Johnson, 2014, h. 123) menyatakan bahwa dalam kriminalisasi mengandung prinsip kerugian. Dalam prinsip ini, kriminalisasi dibenarkan apabila perilaku yang membahayakan orang lain. Namun, sulit ditentukan, bahaya seperti apa yang dimaksud. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminalisasi yang berlebihan karena penggambaran kata bahaya yang kurang jelas.

Johnson (2014, h. 123) menjelaskan bahwa kriminalisasi dianggap benar apabila melukai orang lain. 'Melukai' menjadi sebuah takaran dari kata bahaya yang digunakan untuk melakukan tindak kriminalisasi. Misalnya, kepemilikan sebuah senjata tanpa melukai orang lain bukan sebuah masalah yang dapat dikriminalisasikan sampai senjata api itu digunakan untuk melukai orang lain. Kepemilikan tersebut dapat menjadi sebuah alat yang dapat melindungi pemiliknya ketika dalam situasi bahaya. Namun, Ashworth (dikutip dalam Johnson, 2014, h. 123) mengatakan bahwa tindak pidana boleh saja dilakukan demi menjalankan kewajiban mereka.

Dalam membentuk kriminalisasi, media memiliki efek yang signifikan (McQuail, dikutip dalam Scheufele, 1999, h. 104). Media membentuk kriminalisasi dengan membagi peran ke dalam dua jenis, yaitu korban dan pelaku. Melalui proses framing, khalayak dapat melihat secara jelas siapa yang disebut sebagai korban dan siapa yang disebut sebagai pelaku oleh media dalam tulisannya. Melalui tulisan media tersebut, publik akan beropini yang kemudian opini tersebut akan membantu dalam pembentukan keputusan politik berdasarkan peristiwa tersebut.

## **2.5. KERANGKA PEMIKIRAN**

Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan penulis pada penelitian ini. Peneliti menggunakan analisis Robert N. Entman pada peristiwa kriminalisasi KPK terkait kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad.

U M N

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

